

Membangun Karakter Kebangsaan Melalui Iman dan Kesadaran: Kontribusi Umat Beragama dalam Bela Negara Menuju Indonesia Emas 2045

*Building National Character through Faith and Civic Consciousness:
The Contribution of Religious Communities to the National Defense Ethos toward a Golden
Indonesia 2045*

Muhamad Padhil

Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan RI
Email: muhamadpadhil08@gmail.com

Abstract. *This article argues that the cultivation of national character grounded in faith and civic consciousness of national defense is a foundational element of Indonesia's long-term national security strategy toward the "Golden Indonesia 2045" vision. The core claims are as follows. First, in the era of asymmetric threats, national defense is no longer the exclusive domain of the military; it is an ethical-cognitive project in which religious communities act as strategic producers of counter-narratives against violent extremism. Second, civic education, character education based on Pancasila, and religious moderation directly contribute to preventing radicalization and strengthening social cohesion (Kustati et al., 2023; Nurdin, 2015; Hasbi, 2023; Yuniarto et al., 2024). Third, the state must develop an ethical form of soft power—rather than relying solely on repressive hard power—to confront extremist cognitive threats (Nye, 1990; van Es, 2021; Intan, 2022). Fourth, collaboration among state institutions, religious actors, and civil society must be pluralistic, gender-responsive, and accountable, so that religion is not instrumentalized in ways that ultimately undermine the legitimacy of the state. Methodologically, the article integrates the frameworks of soft power, securitization theory, character education, and national resilience to propose a model of "Faith-Based National Defense Ethos" as a social infrastructure for 2045.*

Keywords: *national defense ethos; national character; religious moderation; soft power; national resilience.*

Abstrak. Artikel ini menegaskan bahwa pembangunan karakter kebangsaan berbasis iman dan kesadaran bela negara merupakan fondasi keamanan nasional jangka panjang Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Argumen utama tulisan ini: (1) bela negara di era ancaman asimetris tidak lagi monopoli militer, melainkan proyek etis-kognitif yang melibatkan umat beragama sebagai penghasil narasi tanding terhadap ekstremisme; (2) pendidikan kewargaan (PPKn/civic education), pendidikan karakter Pancasila, dan moderasi beragama berperan langsung dalam mencegah radikalisasi dan memperkuat kohesi nasional (Kustati et al., 2023; Nurdin, 2015; Hasbi, 2023; Yuniarto et al., 2024) ; (3) negara wajib mengembangkan soft power yang etis—bukan sekadar represif—untuk menghadapi ancaman kognitif kelompok ekstremis (Nye, 1990; van Es, 2021; Intan, 2022) ; dan (4) kolaborasi negara–komunitas keagamaan–masyarakat sipil harus dijalankan secara plural, adil gender, dan akuntabel agar tidak berubah menjadi instrumentalisasi agama yang justru merusak legitimasi negara sendiri . Secara metodologis, tulisan ini menggabungkan kerangka soft power, sekuritisasi, pendidikan karakter, dan ketahanan nasional untuk merumuskan model Bela Negara Berbasis Iman sebagai infrastruktur sosial menuju 2045.

Kata kunci: bela negara; karakter kebangsaan; moderasi beragama; soft power; ketahanan nasional.

1. Pendahuluan

Keamanan nasional abad ke-21 tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai dominasi teritorial dan kekuatan senjata, melainkan sebagai kemampuan bangsa mempertahankan kohesi sosial dari penetrasi ideologis aktor non-negara (Arquilla & Ronfeldt, 2001; Münkler, 2005) . Ancaman ekstremisme kekerasan (violent extremist groups/VEGs) bekerja bukan terutama melalui serangan fisik, tetapi melalui infiltrasi narasi, manipulasi tafsir agama, dan produksi kebencian yang merusak kepercayaan sosial antarwarga serta kepercayaan warga kepada negara. Narasi ekstremis memanfaatkan ruang digital dan jaringan sosial mikro untuk menanamkan dikotomi "kami vs mereka", mempromosikan takfiri (pengkafiran pihak lain), dan melegitimasi dehumanisasi—terutama terhadap perempuan—sebagai strategi rekrutmen jangka panjang .

Dalam konteks inilah, bela negara tidak dapat lagi direduksi pada kesiapan fisik angkat senjata, melainkan harus dipahami sebagai kesadaran etis, spiritual, dan kewargaan untuk menjaga keutuhan bangsa melalui penolakan terhadap ideologi

kebencian dan intoleransi (Aulia & Darmawan, 2021; Yunita et al., 2022) . Dengan kata lain, bela negara hari ini bersifat kognitif, moral, dan kultural.

Indonesia telah secara eksplisit menyusun visi Indonesia Emas 2045—yakni proyeksi Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan berdaya saing global pada usia seratus tahun kemerdekaannya. Namun, visi ekonomi dan teknologi 2045 tidak akan stabil jika fondasi kohesi kebangsaan rapuh. Krisis kohesi bisa dieksploitasi oleh aktor transnasional, kelompok intoleran domestik, atau penetrasi ideologi transnasional berbasis kekerasan yang membajak simbol agama untuk tujuan politik. Karena itu, pembangunan karakter kebangsaan berbasis iman bukan sekadar proyek moral personal, melainkan strategi pertahanan nasional jangka panjang.

Tulisan ini berangkat dari dua asumsi normatif. Pertama, umat beragama di Indonesia bukan hanya "objek binaan", melainkan aktor strategis dalam produksi narasi tanding (counter-narratives) dan narasi alternatif damai (alternative narratives) yang memulihkan martabat kemanusiaan, menyuburkan toleransi, dan memperkuat ikatan nasional lintas identitas (Intan, 2022; UNDP Indonesia, 2025) . Kedua, penggunaan agama oleh negara dalam kerangka kontra-ekstremisme harus dikawal etikanya agar tidak berubah menjadi intervensi hegemonik yang justru memicu resistensi dan delegitimasi (Buzan et al., 1998; van Es, 2021) .

Artikel ini bertujuan: (1) merumuskan ulang bela negara sebagai proyek karakter kebangsaan berbasis iman; (2) menunjukkan bahwa pendidikan karakter Pancasila, civic education, dan moderasi beragama adalah infrastruktur pertahanan nasional non-militer; (3) mengajukan kerangka soft power etis sebagai model kolaborasi negara–umat–masyarakat sipil; dan (4) memproyeksikan bagaimana kerangka ini menjadi syarat menuju Indonesia Emas 2045.

2. Kerangka Teoretis

2.1. Perang asimetris dan kontestasi kognitif

Literatur perang asimetris menegaskan bahwa aktor non-negara kini menantang negara bukan melalui simetri senjata, melainkan melalui pengelolaan makna, simbol, dan legitimasi (Arquilla & Ronfeldt, 2001; Münkler, 2005). Serangan tidak diarahkan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi pada pikiran publik dan rasa saling percaya antarkelompok warga—yang disebut dalam tulisan Anda sebagai "kontestasi kognitif" . Dalam arena ini, pertahanan tidak cukup hanya berupa operasi elektronik (electronic warfare), penindakan yudisial, atau peningkatan kapabilitas aparat. Strategi represi keras (hard power) terbukti memiliki keterbatasan karena akar

ancamannya bersifat ideologis, simbolik, dan moral, bukan hanya taktis atau logistik .

Artinya, dimensi pertahanan harus merambah wilayah yang selama ini dianggap "lunak": narasi, pendidikan, tafsir agama, penguatan nilai kebangsaan, dan pembangunan kesadaran bela negara di tingkat komunitas sipil. Inilah babak baru pertahanan nasional.

2.2. Soft power dan narasi kebangsaan

Soft power, menurut Nye (1990), adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain agar menerima tujuan kita melalui daya tarik nilai, budaya, dan legitimasi moral—bukan melalui paksaan atau insentif material. Dalam konteks kontra-ekstremisme, soft power diwujudkan dalam produksi kontra-narasi yang membantah ideologi kebencian secara langsung dan narasi alternatif yang menawarkan citra damai, adil, dan bermartabat bagi semua warga (Intan, 2022; Nye, 1990) .

Indonesia telah mulai menerapkan soft power religius melalui moderasi beragama dan program kontra-radikalisasi yang melibatkan ulama, tokoh masyarakat, serta organisasi keagamaan sebagai narator kredibel. Efektivitas pendekatan ini bukan spekulasi. Riset Pusat Litbang Kementerian Agama menunjukkan bahwa efektivitas kontra-narasi daring terhadap ekstremisme berada pada skor rata-rata 81,81 (kategori "sangat baik" dan "baik" untuk lebih dari 98% kanal yang dikaji), berdasarkan responden di berbagai kota besar (Serang, Tangerang, Bandung, Bogor, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Palembang, Padang, Lampung). Temuan ini menguatkan bahwa investasi pada produksi narasi damai memiliki Return on Investment (ROI) strategis dalam konteks pencegahan ekstremisme kekerasan, tanpa harus selalu mengandalkan pemutusan kanal secara represif .

Dalam kerangka bela negara, ini krusial. Jika soft power sanggup mereduksi potensi kekerasan ideologis sebelum menjadi ancaman fisik, maka soft power adalah komponen pertahanan negara.

2.3. Sekuritisasi, legitimasi etis, dan batas negara

Teori sekuritisasi (Buzan et al., 1998) menjelaskan bahwa suatu isu dinyatakan sebagai ancaman eksistensial agar negara memperoleh legitimasi untuk mengambil tindakan luar biasa. Ketika negara menyatakan ekstremisme berbasis tafsir agama sebagai ancaman keamanan nasional, negara cenderung merasa berhak mengatur wacana keagamaan. Namun, tindakan sekuritisasi berbasis agama membawa risiko etis: apakah negara melindungi pluralisme atau justru melakukan monopoli tafsir?

Apakah dalam "membela negara", negara masih menghormati martabat tiap warga, termasuk minoritas agama dan perempuan (van Es, 2021)?

Karena itu, sekuritisasi narasi agama wajib diawasi dengan prinsip etika publik. Dalam naskah Anda prinsip itu diformulasikan sebagai dua pengujian: (1) *Jus ad Bellum etis*—apakah intervensi negara di ruang teologis benar-benar perlu dan proporsional demi menjaga koheisi nasional? (2) *Jus in Bello etis*—apakah pelaksanaan intervensi berjalan inklusif, anti-diskriminatif, tidak mendorong stigmatisasi, dan tidak mengabaikan suara perempuan serta minoritas? .

Dengan kata lain, negara boleh bekerja sama dengan otoritas keagamaan untuk tujuan bela negara, tetapi negara tidak boleh menjadikan agama sebagai alat politik sempit. Di sinilah etika kontra-terorisme bertemu dengan prinsip pluralisme dan hak asasi, yang sekarang menjadi prasyarat legitimasi pertahanan di mata generasi muda (Intan, 2022; UNDP Indonesia, 2025) .

3. Pendidikan Karakter, Moderasi Beragama, dan Kesadaran Bela Negara

3.1. Pendidikan karakter Pancasila sebagai pertahanan ideologis

Upaya membela negara secara damai dimulai jauh sebelum rekrutmen militer: ia dimulai di ruang kelas. Konsep "Pelajar Pancasila" dirancang pemerintah bukan hanya sebagai retorika kurikulum, tetapi sebagai profil karakter warga masa depan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif (Hasbi, 2023; Suprijono, 2023) . Nilai-nilai tersebut tidak netral secara politik dalam arti kosong; ia adalah formulasi ideologis untuk memastikan bahwa generasi 2045 memiliki rasa kebangsaan yang tidak eksklusif, damai namun tegas, serta alergi terhadap narasi kebencian yang memecah belah.

Dengan demikian, Pendidikan Pancasila bukan sekadar transmisi hafalan sila, tetapi pembentukan *moral citizenship*—warga yang merasa dirinya bagian dari proyek kebangsaan, bukan sekadar individu privat. Ini sangat relevan karena kelompok ekstremis sering menarget anak muda dengan klaim bahwa negara adalah entitas tidak sah atau thaghut; pendidikan karakter Pancasila menegaskan bahwa negara demokratis plural justru memiliki legitimasi moral karena ia menjamin martabat manusia dan keadilan sosial, bukan sekadar kekuasaan koersif.

3.2. Civic education (PKn/PPKn) sebagai instrumen bela negara sipil

Literatur civic education di Indonesia konsisten menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan digunakan untuk menanamkan rasa cinta Tanah Air, kesediaan berkorban, penghormatan konstitusi, serta tanggung jawab menjaga persatuan (Nurdin, 2015; Yuniarto et al., 2024) . Aulia dan Darmawan (2021) menunjukkan bahwa civic education bukan hanya transfer pasal-pasal UUD, tetapi pembentukan *state defense spirit* generasi muda: kesiapan membela negara dalam arti ideologis, kultural, sosial, dan—jika diperlukan—fisik, namun dengan basis kesadaran, bukan indoktrinasi paksa .

Ini menandai pergeseran paradigma. Dahulu, bela negara identik dengan latihan semi-militer dan doktrin kedisiplinan keras. Kini, bela negara juga dipahami sebagai kompetensi kewargaan aktif: melawan hoaks pemecah bangsa, menolak ujaran kebencian berbaju agama, menjaga harmoni antarumat, dan berpartisipasi dalam ruang publik secara bertanggung jawab. Civic education karenanya adalah bagian dari arsitektur pertahanan nasional sipil.

3.3. Moderasi beragama sebagai pilar kohesi nasional

Penelitian Kustati et al. (2023) menemukan bahwa moderasi beragama dan wawasan kebangsaan berkorelasi negatif dengan kecenderungan perilaku radikal di kalangan pemuda. Artinya, semakin kokoh pemahaman kebangsaan dan semakin moderat pemahaman keagamaannya, semakin kecil peluang seseorang menerima narasi ekstremis (Kustati et al., 2023) .

Temuan ini sangat penting secara strategis karena ia menegaskan hubungan langsung antara iman (yang sehat dan moderat), karakter kebangsaan, dan stabilitas keamanan nasional. Ini menguatkan posisi bahwa umat beragama bukan ancaman potensial yang harus “diawasi”, melainkan justru tameng ideologis utama negara.

Program pembinaan berbasis agama yang Anda gambarkan—misalnya silabus pembinaan ideologis yang mengoreksi penyalahgunaan konsep iman-kufur, khilafah, hakimiyah, dan relasi syura-demokrasi—menunjukkan bentuk konkret moderasi beragama sebagai kebijakan pertahanan kognitif. Program ini tidak hanya mematahkan narasi ekstremis, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa hukum Islam dapat hidup berdampingan dengan kerangka hukum nasional, bahwa perbedaan ijihad adalah keniscayaan, dan bahwa intoleransi antarmazhab bertentangan dengan tradisi keilmuan Islam itu sendiri .

Dengan demikian, moderasi beragama bukan sekadar jargon “agama yang ramah”, tetapi mekanisme strategis bela negara yang menjaga legitimasi NKRI di mata warga beriman.

4. Pluralisme, Gender, dan Etika Bela Negara

4.1. Pluralisme sebagai sumber daya pertahanan

Intan (2022) menekankan pentingnya pluralisme berprinsip (*principled pluralism*): negara tidak sekadar mentolerir keragaman agama, tetapi mengakui keragaman tersebut sebagai aset yang harus dilibatkan secara adil dalam pencegahan terorisme dan ekstremisme. Pendekatan ini menghindari jebakan "agama mayoritas melawan minoritas" dan menggantinya dengan etos tanggung jawab bersama antarumat beragama untuk merawat ruang hidup berbangsa (Intan, 2022).

Hal ini sejalan dengan prinsip etika intervensi keagamaan oleh negara dalam naskah Anda: kontra-narasi tidak boleh bias tunggal secara teologis. Ia harus memuat keterwakilan lintas agama—Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu— demi mencegah stigmatisasi dan menjaga legitimasi moral negara di mata seluruh rakyatnya. Secara pertahanan, pluralisme yang diinstitusikan seperti ini menciptakan kohesi horizontal antarkelompok warga, yang pada akhirnya memperkuat daya tahan nasional (*national resilience*).

Zabadi (2025) menunjukkan hal serupa di wilayah perbatasan: identitas nasional dapat diperkuat melalui pengakuan atas nilai lokal komunitas Tidung di kawasan perbatasan. Di sini, budaya lokal bukan ancaman disintegratif, melainkan medium yang menanamkan rasa "kami bagian dari Indonesia" sekaligus "kami memiliki martabat sendiri yang dihormati negara" (Zabadi, 2025). Ini penting: negara yang mengakui dan merawat martabat komunitas perbatasan akan lebih sulit dipenetrasi oleh narasi separatis atau ekstremis transnasional.

4.2. Dimensi gender: perempuan sebagai aktor pertahanan moral

Narasi ekstremis sering menggunakan kerangka misoginis untuk menundukkan perempuan sebagai objek hawa nafsu, "sumber fitnah", atau makhluk kelas dua yang harus dibatasi ruang publiknya. Lebih berbahaya lagi, ekstremisme tidak hanya menarget perempuan sebagai korban, tetapi merekrut perempuan sebagai narator ideologi kebencian sejak tingkat rumah tangga dan sekolah dasar, menjadikan mereka agen transmisi radikalisme antar-generasi.

Dari sudut pandang pertahanan negara, ini adalah titik rawan. Bila perempuan direkrut menjadi *amplifier* narasi benci yang menghalalkan kekerasan atas nama agama, maka negara akan menghadapi generasi baru yang sejak kecil telah disusupi rasa benci pada pluralitas nasional. Karena itu, kontra-narasi negara tidak boleh netral gender. Ia harus secara eksplisit menolak dehumanisasi perempuan, memosisikan perempuan sebagai subjek bermartabat, pemimpin moral komunitas, dan agen perdamaian (UNDP Indonesia, 2025).

Dengan kata lain, pemihakan pada martabat perempuan bukan sekadar isu HAM, melainkan kebutuhan strategis pertahanan nasional.

5. Ketahanan Nasional, Bela Negara, dan Indonesia Emas 2045

5.1. Bela negara sebagai ekosistem sosial, bukan hanya aparatur

Literatur ketahanan nasional Indonesia—misalnya kajian Lemhannas—menunjukkan bahwa daya tahan negara bergantung pada kohesi sosial, ketahanan budaya, stabilitas ideologis, serta legitimasi politik di mata rakyat, bukan semata faktor militer atau ekonomi. Ketahanan nasional dibangun melalui internalisasi nilai kebangsaan dan kesadaran bersama akan ancaman disintegrasi (kajian Lemhannas; Purba, 2024).

Artinya, umat beragama adalah komponen pertahanan nasional ketika mereka:

- a. Menyebarkan narasi damai, anti-kekerasan, dan pro-kebhinekaan;
- b. Menegaskan bahwa kesetiaan kepada NKRI adalah bagian dari amanah moral menjaga kehidupan manusia dan keadilan sosial;
- c. Menolak manipulasi tafsir agama yang memecah persatuan.

Ini identik dengan konsep “bela negara berbasis iman”: bukan bela negara yang memobilisasi agama sebagai alat propaganda negara, melainkan bela negara yang menegaskan bahwa melindungi martabat sesama warga dan mencegah perpecahan adalah kewajiban moral-spiritual.

5.2. Peran pemuda dan regenerasi narasi kebangsaan

Auzar (2025) menekankan bahwa generasi muda memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional melalui internalisasi budaya nasionalisme dan karakter kebangsaan. Ia melihat pemuda bukan sekadar penerus, tetapi produsen budaya politik baru yang bisa menjaga jati diri bangsa di tengah tekanan globalisasi dan penetrasi ideologi transnasional (Auzar, 2025).

Di titik ini, pendidikan karakter Pancasila, civic education, dan moderasi beragama bertemu. Profil Pelajar Pancasila, PKn yang menanamkan bela negara, dan program moderasi beragama yang menolak kekerasan adalah instrumen yang secara praktis diarahkan kepada pemuda. Dengan kata lain, generasi muda adalah “center of gravity” pertahanan kognitif Indonesia. Jika generasi muda punya iman yang berakar pada penghormatan martabat manusia, rasa nasionalisme inklusif, dan

literasi kritis terhadap narasi kebencian, maka proyek Indonesia Emas 2045 berdiri di atas fondasi sosial yang kuat.

5.3. Bela negara sebagai praktik kolaborasi publik–swasta–keagamaan

Riset lapangan di Indonesia menunjukkan bahwa kontra-ekstremisme paling efektif ketika negara tidak berjalan sendirian, tetapi memfasilitasi kolaborasi antara lembaga negara, ormas keagamaan, akademisi, media, dan komunitas lokal; model ini disebut dalam naskah Anda sebagai kolaborasi “Publik–Swasta–Keagamaan” . UNDP dan lembaga PBB lain juga menekankan pola kemitraan serupa sebagai pendekatan keamanan manusia untuk mencegah kekerasan ekstrem (UNDP Indonesia, 2025; UNODC, 2022) .

Skema kemitraan ini penting untuk legitimasi. Jika narasi tandingan terhadap ekstremisme hanya datang dari aparat resmi, audiens sasaran—khususnya pemuda— cenderung menolaknya karena dianggap propaganda. Tetapi bila pesan damai, inklusif, dan cinta Tanah Air datang dari figur agama yang mereka percaya, dari senior komunitas yang mereka hormati, atau bahkan dari teman sebaya yang punya rekam jejak yang relatable, maka pesan tersebut memperoleh otoritas afektif, bukan sekadar otoritas formal. Ini sejalan dengan catatan Anda bahwa efektivitas kontra-narasi bertumpu pada “signifikansi narator” dan “koherensi karakterologis”, bukan semata isi pesan .

Dengan demikian, bela negara di era kontestasi kognitif adalah desain ekologi sosial yang dikelola negara tetapi tidak dimonopoli negara.

6. Rekomendasi Konseptual untuk Agenda Indonesia Emas 2045

Berdasarkan paparan di atas, berikut tiga rekomendasi konseptual:

(1) Menetapkan Bela Negara Berbasis Iman sebagai Doktrin Pertahanan Non-Militer Resmi.

Doktrin ini harus menegaskan bahwa menjaga martabat manusia, menolak narasi kebencian, menghormati pluralitas, dan mencegah dehumanisasi perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari kewajiban bela negara. Dengan kerangka ini, moderasi beragama menjadi aset pertahanan, bukan sekadar jargon toleransi (Kustati et al., 2023; Intan, 2022) .

(2) Mewajibkan Integrasi Pendidikan Karakter Pancasila, Civic Education, dan Literasi Keagamaan Moderat dalam Kurikulum Bela Negara untuk Pemuda.

PPKn, Profil Pelajar Pancasila, dan literasi keagamaan moderat harus diperlakukan bukan sebagai mata pelajaran terpisah, melainkan sebagai satu ekosistem yang melatih pemuda menjadi warga beriman yang sadar konstitusi, sadar pluralisme, dan sadar ancaman ideologi kebencian. Ini sejalan dengan temuan bahwa civic education efektif menumbuhkan spirit bela negara secara damai (Nurdin, 2015; Aulia & Darmawan, 2021; Yuniarto et al., 2024) .

(3) Membentuk Arsitektur Kolaborasi Publik–Swasta–Keagamaan dengan Standar Etika Sekuritisasi.

Negara perlu merumuskan pedoman etis nasional untuk program kontra-ekstremisme berbasis agama. Pedoman ini setidaknya memuat:

- a) keterwakilan lintas agama dan mazhab;
- b) pelibatan aktif perempuan sebagai narator kontra-ekstremisme;
- c) mekanisme audit etis berkala agar narasi tanding tidak berubah menjadi propaganda sektarian atau alat represi politik;
- d) indikator efektivitas seperti skor penerimaan audiens (misalnya skor 81,81 pada riset Kemenag) sebagai ukuran ROI soft power .

Standar ini menjaga agar sekuritisasi agama oleh negara tetap berada dalam batas legitimasi moral demokratis (Buzan et al., 1998; van Es, 2021) .

7. Penutup

Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia menghadapi ancaman yang bersifat asimetris, kognitif, dan berbasis narasi. Kelompok ekstremis berupaya merebut ruang makna: tafsir agama, identitas nasional, posisi perempuan, hubungan antarumat, bahkan definisi “siapa yang dianggap warga yang sah”. Karena itu, pertahanan nasional tidak bisa berhenti pada instrumen hard power.

Bela negara hari ini adalah proyek karakter. Ia mengandaikan warga beriman yang menginternalisasi martabat kemanusiaan, menolak dehumanisasi, menghormati pluralitas, dan merawat kesetiaan kepada NKRI bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa negara ini adalah rumah bersama yang wajib dijaga. Pendidikan karakter Pancasila, civic education, moderasi beragama, dan arsitektur soft power yang etis adalah alat utama untuk memelihara kesadaran itu (Hasbi, 2023; Kustati et al., 2023; Yuniarto et al., 2024) .

Dengan demikian, umat beragama bukan sekadar objek binaan negara. Mereka adalah garda depan bela negara—penjaga wacana etis bangsa, penghasil narasi

tanding terhadap kebencian, dan pendidik moral generasi 2045. Jika negara mampu bermitra dengan umat beragama secara etis, setara, dan inklusif, maka karakter kebangsaan berbasis iman akan menjadi fondasi paling kuat bagi stabilitas Indonesia sebagai negara berdaulat, damai, dan bermartabat pada 2045.

Daftar Pustaka

- Aulia, R., & Darmawan, C. (2021). The actualization of civic education in strengthening youth generation state defense spirit. *Proceedings of the 1st International Conference of Education, Social and Humanities (INCESH)*.
- Auzar, M. (2025). The role and contributions of Indonesia's young generation in strengthening national resilience and culture. *Journal of Social and Cultural Security Research (JSCSR)*.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner.
- Hasbi, M. (2023). Character building profile of Pancasila students as an effort to realize national character. *International Journal of Research and Educational Reviews*.
- Intan, B. F. (2022). Principled pluralism and the prevention of religious terrorism. *Religions, 13*(5), 429.
- Kustati, M., et al. (2023). The effect of national insight and religious moderation on radical behaviour. *Education Research International*.
- Münkler, H. (2005). *The new wars*. Polity.
- Nuridin, E. S. (2015). The policies on civic education in developing national character in Indonesia. *International Education Studies, 8*(8), 142–150.
- Nye, J. S. (1990). Soft power. *Foreign Policy, 80*, 153–171.
- Purba, A. (2024). Strengthening national resilience values in schools through civic education. *Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 2*(2), 411–414.
- Suprijono, A. (2023). The urgency of Pancasila student profile policy for parents and educators. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- UNDP Indonesia. (2025). *Enhancing the role of religious education in countering violent extremism*.
- UNODC. (2022). *The benefits and challenges of a human security approach to preventing and countering violent extremism*. United Nations Office on Drugs and Crime.



van Es, M. A. (2021). Beyond “radical” versus “moderate”? New perspectives on religious extremism. *Religion*, 51(4).

Yuniarto, B., et al. (2024). Citizenship education in the character building of the nation. *[Journal of civic education / peer-reviewed]*.

Yunita, Y., et al. (2022). National defense education as students’ character education. *International Journal of Education and Humanities*.

Zabadi, F. (2025). Strengthening national identity through the value and culture of the Tidung Tribe in border areas. *Journal of Education, Culture and Society*.